

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan

B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 1 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	RAPBD Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	38.661	33.749	87.19	18.440.936.000
2.	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Jumlah Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	77.978	85.638	109.82	36.379.867.000
	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	Jumlah Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar	38.285	34.318	89.64	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	RAPBD Tahun 2020
		dalam pendidikan dasar/SMP/MTs				
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	38.661	1.968	67.33	5.382.900.000,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2020

Sasaran jenis Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan meliputi:

- a. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.
- b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.
- d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

C. REALISASI

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 2 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi capaian (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	RAPBD Tahun 2020	Jumlah orang yang terlayani	APBD Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	38.661	18.440.936.000	33.749	18.440.936.000	87.19
2.	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Jumlah Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	77.978	36.379.867.000	85.638	36.379.867.000	109.82
	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	Jumlah Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	38.285		34.318		89.64
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.923	5.382.900.000	1.968	5.382.900.000	67.33

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2020

Analisis realisasi SPM bidang Pendidikan diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yang termasuk sasaran program dalam indikator Pendidikan Anak Usia Dini adalah jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam Pendidikan anak usia dini selama 1 (satu) tahun. Pada tahun 2020 jumlah sasaran Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Wonosobo adalah 38.661 orang yang ditargetkan seluruhnya terlayani. Berdasarkan anggaran yang tersedia, dari jumlah sasaran tersebut baru tercapai 33.749 orang atau 87,19% yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Sedangkan sisanya sejumlah 4.912 orang atau 12,71% belum terlayani berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar yang diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo terdiri dari tingkatan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

1) Pendidikan Sekolah Dasar/MI

Sasaran dalam program Pendidikan Sekolah Dasar/MI adalah jumlah warga negara usia 7-12 tahun. Bentuk pelayanan dasar yang dilaksanakan yaitu warga negara usia 7-12 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI.

Pada tahun 2020, jumlah sasaran di Kabupaten Wonosobo tercatat 77.978 orang yang secara keseluruhan ditargetkan terlayani kebutuhan dasarnya dalam pendidikan dasar SD/MI. Berdasarkan anggaran yang tersedia, realisasi jumlah warga negara usia pendidikan dasar SD/MI yang terlayani dan berpartisipasi dalam pendidikan SD/MI sejumlah 85.638 atau 109,82% dari yang ditargetkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan warga negara di Kabupaten Wonosobo usia 7-12 tahun sudah terlayani dan berpartisipasi dalam pendidikan dasar SD/MI.

Capaian yang melebihi 100% tersebut dapat dijelaskan bahwa data untuk penentuan jumlah sasaran menggunakan data jumlah warga negara Kabupaten Wonosobo yang berusia 7-12 tahun. Sedangkan data realisasi capaian menggunakan data jumlah seluruh siswa yang tercatat dari seluruh sekolah SD/MI di Kabupaten Wonosobo. Kelebihan capaian dimungkinkan karena kondisi sebagai berikut:

- warga negara yang tercatat sebagai siswa SD/MI berasal dari daerah luar Kabupaten Wonosobo yang semula tidak terdaftar dalam target sasaran, akan tetapi dalam realisasi tercatat sebagai warga negara yang terlayani.
- data siswa yang tercatat dalam capaian layanan ada yang usianya kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun sehingga tidak masuk dalam kriteria target terlayani, akan tetapi dalam realisasi capaian tercatat sebagai warga negara yang terlayani.

2) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/MTs

Sasaran dalam program Pendidikan Dasar pada Sekolah Menengah Pertama/MTs adalah jumlah warga negara usia 13-15 tahun. Bentuk pelayanan dasar yang dilaksanakan yaitu warga negara usia 13-15 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar Sekolah Menengah Pertama/MTs.

Pada tahun 2020, jumlah sasaran di Kabupaten Wonosobo tercatat 38.285 orang yang secara keseluruhan ditargetkan terlayani kebutuhan dasarnya dalam pendidikan dasar Sekolah Menengah Pertama/MTs. Berdasarkan anggaran yang tersedia, realisasi jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang terlayani dan berpartisipasi dalam pendidikan dasar Sekolah Menengah Pertama/MTs jumlah 34.318 atau 89,64% dari yang ditargetkan. Sedangkan sisanya sejumlah 3.967 orang atau 10,36% belum berpartisipasi dalam pendidikan dasar Sekolah Menengah Pertama/MTs.

c. Pendidikan Kesenjangan

Sasaran dalam indikator Pendidikan Kesenjangan adalah jumlah warga negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah. Bentuk pelayanan dasar yang dilaksanakan yaitu warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Pada tahun 2020, jumlah sasaran untuk pendidikan kesetaraan di Kabupaten Wonosobo tercatat 2.923 orang yang secara keseluruhan ditargetkan terlayani kebutuhan dasarnya dalam pendidikan kesetaraan. Berdasarkan anggaran yang tersedia, realisasi jumlah warga negara sasaran penerima layanan pendidikan kesetaraan yang terlayani dan berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan berjumlah 1.968 atau 67,33% dari yang ditargetkan. Sedangkan sisanya sejumlah 955 orang atau 32,67% belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

D. ALOKASI ANGGARAN

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, pada Tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp96.862.128.670,00. Alokasi anggaran tersebut merupakan akumulasi dari sumber pendanaan APBN, Bantuan Keuangan Provinsi dan APBD. Besaran alokasi anggaran menurut sumber pendanaan sebagai berikut:

- a. APBN sebesar: Rp47.077.973.000,00
- b. Bantuan Keuangan Provinsi: Rp7.696.000.000,00
- c. APBD : Rp 42.088.155.670,00

Berdasarkan alokasi anggaran pada tahun 2020 untuk pemenuhan SPM bidang pendidikan, direalisasikan sebesar Rp91.896.769.120,00 atau 94,87%.

E. DUKUNGAN PERSONEL

Dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo tahun 2020, didukung oleh personel terutama dari aparaturnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

1) Perencanaan

- kesulitan verifikasi data ATS.
- belum adanya perencanaan yg spesifik mengenai SPM.
- program dan kegiatan belum sepenuhnya terintegrasi dalam Renstra dikarenakan Renstra mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 dan penyesuaian program dan kegiatan dalam permendagri 90 tahun 2018.

2) Pendanaan

- anggaran untuk pemenuhan SPM belum sepenuhnya tersedia.

3) Lain-Lain

- integrasi data NIK dan NISN belum Maksimal
- belum terverifikasinya data siswa miskin yang menjadi sasaran prioritas pemenuhan SPM.

b. Solusi

1) Perencanaan

- Bekerja sama dengan mitra kerja pendidikan dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan verifikasi pendataan ATS kesulitan verifikasi data ATS.

2) Pendanaan

- Mengabungkan anggaran kegiatan yang bertujuan untuk pencapaian SPM.

3) Lain-Lain

- Koordinasi dengan lintas sektor guna pencapaian SPM.

4.2 URUSAN KESEHATAN

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Daerah Kabupaten.

Kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga TB
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel IV. 3 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	RAPBD Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	13.244	13.244	100%	1.777.739.500
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	12.480	12.480	100%	6.248.463.400
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	12.446	12.446	100%	524.936.700
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	66.631	66.631	100%	2.624.579.900
5.	Pelayanan kesehatan pada usia	Jumlah Warga Negara usiapendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	111.841	111.841	100%	824.523.700

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	RAPBD Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
	pendidikan dasar					
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	488.869	488.869	100%	1.283.287.000
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	104.670	104.670	100%	870.577.300
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	272.259	272.259	100%	457.550.900
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes militus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	5.396	5.396	100%	624.744.900
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	1.984	1.984	100%	263.215.100
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	9.225	9.225	100%	471.029.600
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	17.510	17.510	100%	190.215.100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

C. Realisasi

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 4 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi capaian (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	RAPBD Tahun 2020	Jumlah orang yang terlayani	APBD Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	13.244	1.777.739.500	12.526	1.777.739.500	94,58%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	12.480	6.248.463.400	12.459	6.248.463.400	99,83%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	12.446	524.936.700	12.283	524.936.700	98,69%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	66.631	2.624.579.900	55.974	2.624.579.900	84,01%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usiapendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	111.841	824.523.700	45.496	824.523.700	40,68%

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi capaian (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	RAPBD Tahun 2020	Jumlah orang yang terlayani	APBD Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	JumlahWargaNegara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	488.869	1.283.287.000	153.992	1.283.287.000	31,50%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	104.670	870.577.300	75.215	870.577.300	71,86%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderitahipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	272.259	457.550.900	41.566	457.550.900	15,27%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderitadiabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	5.396	624.744.900	5.379	624.744.900	99,68%%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	1.984	263.215.100	1.460	263.215.100	73,59%

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi capaian (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	RAPBD Tahun 2020	Jumlah orang yang terlayani	APBD Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	9.225	471.029.600	3.397	471.029.600	36,82%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	17.510	190.215.100	16.469	190.215.100	94,05%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

D. Alokasi Anggaran

Guna mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, alokasi anggaran pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel IV. 5 Alokasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020

No.	Jenis Layanan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	1.777.739.500	1.434.070.150	80,67
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standar	6.248.463.400	5.859.949.900	93,78
3	Pelayanan Kesehatan BBL sesuai Standar	524.936.700	499.902.075	95,23
4	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	2.624.579.900	2.287.176.175	87,14
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	824.523.700	608.968.900	73,86
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia 15-59 tahun sesuai Standar	1.283.287.000	1.174.405.700	91,52
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	870.577.300	759.764.750	87,27
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	457.550.900	342.505.100	74,86
9	Pelayanan Kesehatan Penderita DM sesuai Standar	624.744.900	467.563.600	74,84
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat sesuai Standar	263.215.100	189.816.000	72,11
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC sesuai Standar	471.029.600	374.877.000	79,59
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Trerinfeksi HIV	190.215.100	119.257.000	62,70

E. Dukungan Personel

Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan dengan dukungan personel sebagai berikut:

Tabel IV. 6 Dukungan Personel Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020

Instansi	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Perawat Gigi	Bidan	Kesehatan Masy	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Teknologi Lab Medik	Teknis Kefarmasian (AA)	Apoteker	Tenaga Penunjang Kesehatan	Jumlah Tenaga
DINAS KESEHATAN	1	0	2	0	2	7	5	4	3	3	1	41	69
WADASLINTANG 1	1	1	10	1	16	1	1	2	1	0	2	16	52
WADASLINTANG 2	2	1	4	1	7	1	0	1	0	0	0	5	22
KEPIL 1	1	1	6	0	14	1	1	1	1	1	1	12	40
KEPIL 2	2	1	11	1	10	2	1	2	1	0	1	10	42
SAPURAN	2	1	13	1	21	1	1	2	2	1	1	11	57
KALIBAWANG	1	1	6	0	10	1	2	1	0	0	2	8	32
KALIWIRO	2	0	10	1	21	2	1	2	2	0	1	20	62
LEKSONO 1	2	1	6	1	13	2	1	1	2	1	1	5	36
LEKSONO 2	1	1	6	0	7	1	1	1	0	0	1	1	20
SUKOHARJO 1	2	1	7	1	14	2	1	2	1	0	1	7	39
SUKOHARJO 2	1	0	3	1	8	2	1	1	0	0	0	2	19
SELOMERTO 1	2	1	15	0	24	4	1	2	2	0	1	15	67
SELOMERTO 2	2	1	4	0	12	2	1	1	1	1	1	4	30
KALIKAJAR 1	2	1	6	1	0	2	2	1	1	1	1	10	28
KALIKAJAR 2	2	1	5	1	12	2	2	1	2	1	1	6	36

Instansi	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Perawat Gigi	Bidan	Kesehatan Masy	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Teknologi Lab Medik	Teknis Kefarmasian (AA)	Apoteker	Tenaga Penunjang Kesehatan	Jumlah Tenaga
KRETEK 1	1	1	6	1	18	2	2	1	1	1	0	9	43
KRETEK 2	2	1	7	1	13	2	1	1	1	2	0	7	38
WONOSOBO 1	2	1	6	2	26	2	1	2	1	1	0	9	53
WONOSOBO 2	2	1	5	1	6	2	1	1	1	1	0	6	27
WATUMALANG	2	1	10	1	21	2	0	2	1	1	1	9	51
MOJOTENGAH	2	1	8	2	25	3	1	1	2	1	1	10	57
G A R U N G	2	1	9	1	24	0	1	1	1	1	0	13	54
KEJAJAR 1	2	1	14	1	17	1	1	2	1	1	1	7	49
KEJAJAR 2	2	1	4	0	11	2	1	1	0	1	0	3	26
JUMLAH	43	22	183	20	352	49	31	37	28	19	19	246	1.049

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, diuraikan berdasarkan jenis layanan dasar sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil tidak mencapai target SPM.

1) Permasalahan:

- Partus immpartu/persalinan yang belum cukup bulan yaitu pada usia kehamilan 20-28 minggu.
- Abortus (pada usia 20 minggu kebawah).
- Bumil pindah setelah mendapat pelayanan K1-K3.
- K1 akses/kontak pertama nakes/periksa setelah usia kehamilan pada trimester 1.

2) Solusi:

- memaksimalkan kegiatan kelas ibu hamil
- melaksanakan penyuluhan kesehatan melalui kegiatan PKK, Dawis, Perkumpulan Remaja dan lain-lain yang menyampaikan tentang Anemia pada kehamilan, gizi ibu hamil, kehamilan sehat dan terencana, kesehatan reproduksi.
- melaksanakan ANC terpadu adalah Program pelayanan untuk ibu hamil dengan prinsip menyediakan pelayanan antenatal terintegrasi, komprehensif dan berkualitas mendeteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil. Integrasi program dari ANC Terpadu yaitu maternal neonatal tetanus elimination (MNTE), antisipasi defisiensi gizi dalam kehamilan, pencegahan malaria dalam kehamilan (PMDK), pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi (PMTCT), perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), pencegahan dan pengobatan IMS/ISK dalam kehamilan, eliminasi sifilis congenital (ESK/CSE), dan penatalaksanaan TB dalam kehamilan (TB-ANC), serta pemeriksaan kesehatan gigi ibu hamil.
- pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin tidak mencapai target SPM.

1) Permasalahan:

- adanya kasus ibu meninggal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin secara lengkap.

2) Solusi:

- memaksimalkan kegiatan kelas ibu hamil.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan ibu bersalin tidak mencapai target SPM.

1) Permasalahan:

- masih adanya kasus lahir sendiri atau kebrojolan.

2) Solusi:

- disediakan rumah tunggu bagi ibu hamil yang sudah cukup umur kehamilan untuk persalinan.
- memaksimalkan kegiatan kelas ibu hamil.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita tidak mencapai target SPM.

1) Permasalahan

Sehubungan dengan adanya Pandemi COVID- banyak Posyandu yang diliburkan sehingga capaian Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan tidak sesuai indikator yaitu 8 kali (banyak Balita *drop out* di pemantauan pertumbuhan).

2) Solusi

Posyandu tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan di buat jadwal kedatangan ke posyandu agar tidak terjadi kerumunan.

e. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tidak mencapai target renja maupun target SPM.

1) Permasalahan

- target pelayanan kesehatan pada usia kesehatan dasar tidak bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh karena pandemi COVID-19 dengan kebijakan untuk pembelajaran anak sekolah dilaksanakan dari rumah sehingga tidak dapat dilakukan pemantauan kesehatan anak sekolah dasar.

2) Solusi

- selama Pandemi akan mengikutkan pemeriksaan kesehatan anak sekolah dasar pada posyandu balita dimasing-masing desa sesuai tempat tinggal.
- akan dilaksanakan pembentukan Posyandu Remaja.

f. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Pelayanan kesehatan usia produktif tidak mencapai target SPM 100%.

1) Permasalahan

- Masih terbatasnya sarana – prasarana Posbindu untuk mendukung pemeriksaan skrining usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah.
- Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu masih kurang.

- Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu yang terlatih masih kurang.
- Adanya Pandemi COVID-19 kegiatan posbindu banyak yang ditunda sehingga tidak dapat melakukan pelayanan Kesehatan.

2) Solusi

- sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat.
- monitoring evaluasi pelayanan skrining di posbindu.
- mengoptimalkan Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat.
- pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
- peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan.

g. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan usia lanjut tidak mencapai target SPM

1) Permasalahan

- sehubungan dengan adanya Pandemi COVID-19 banyak Posyandu Lansia yang diliburkan dan lansia dihimbau untuk berdiam diri di rumah sehingga banyak lansia yang tidak melakukan cek kesehatan ke puskesmas.

2) Solusi

- monitoring evaluasi pelayanan posyandu lansia.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi tidak mencapai target SPM 100 %.

1) Permasalahan

- target yang ditetapkan terlalu tinggi.
- pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu masih kurang.
- kader sebagai tenaga pelaksana posbindu yang terlatih masih kurang.
- sarana prasarana untuk kegiatan posbindu masih kurang.
- adanya Pandemi COVID-19 kegiatan posbindu banyak yang ditunda sehingga tidak dapat melakukan pelayanan Kesehatan.

2) Solusi

- monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Posbindu.
- mengoptimalkan Sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat.
- pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
- peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan:

- peningkatan kapasitas kader
 - ✓ jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan atau pembinaan secara intensif
 - ✓ kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya pengendalian PTM
- penguatan anggaran dengan Peningkatan peran lintas program lintas sektor.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus belum mencapai target SPM.

1) Permasalahan

- pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan Posbindu masih kurang.
- Kader sebagai tenaga pelaksana posbindu yang terlatih masih kurang.
- sarana prasarana untuk kegiatan posbindu masih kurang
- adanya Pandemi COVID-19 kegiatan Posbindu banyak yang ditunda sehingga tidak dapat melakukan pelayanan Kesehatan.

2) Solusi

- monitoring dan evaluasi pelaksanaan Posbindu.
- mengoptimalkan sosialisasi Program PTM dan posbindu pada seluruh sasaran masyarakat.
- pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
- peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan.
- peningkatan kapasitas kader;
 - ✓ jumlah kader PTM sangat perlu untuk diadakan melalui pelatihan atau pembinaan secara intensif.
 - ✓ kualitas kader posbindu juga perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan maupun inovasi aksi daerah terkait upaya pengendalian PTM.
- penguatan anggaran dengan Peningkatan peran lintas program lintas sektor.

j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat belum mencapai target SPM.

1) Permasalahan

- sasaran yang ditetapkan oleh Provinsi tinggi.

- adanya Pandemi COVID-19 berakibat pada kunjungan ODGJ ke Puskesmas dan kunjungan petugas ke rumah dengan pasien ODGJ kurang maksimal.

2) Solusi

- melaksanakan monitoring evaluasi pelayanan kesehatan jiwa.
- mendorong pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) dalam rangka membantu penemuan kasus ODGJ berat.

k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB

Pelayanan kesehatan orang dengan TB tidak mencapai target SPM 100%.

1) Permasalahan

Penemuan terduga TBC secara aktif dimasyarakat kurang maksimal disebabkan adanya pandemi Covid-19.

2) Solusi

- Meningkatkan penemuan terduga TBC secara aktif di masyarakat dengan:
 - ✓ Rekrutment petugas teknis TBC.
 - ✓ Pemberdayaan kader TBC Desa.
- Bekerjasama dengan PT. Pos untuk pengiriman spesimen dahak ke fasilitas rujukan TCM (Tes Cepat Molekuler) sehingga terduga TBC tidak harus datang ke fasilitas kesehatan untuk periksa dahak.

l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tidak mencapai target SPM 100 %.

1) Permasalahan

- kurang maksimalnya edukasi tentang pentingnya pemeriksaan HIV pada orang berisiko terinfeksi HIV sehingga masih ada orang berisiko yang menolak diperiksa HIV.
- penjangkauan ke kelompok berisiko kurang maksimal karena adanya pandemi COVID-19.

2) Solusi

- meningkatkan edukasi tentang pemeriksaan HIV kepada masyarakat.
- melaksanakan pemeriksaan HIV terintegrasi dengan program lain seperti ANC ibu hamil, pelayanan TB-HIV.
- meningkatkan penjangkauan ke kelompok berisiko terinfeksi.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Dalam perkembangannya Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, K/L telah menetapkan masing-masing Peraturan Menteri tentang Standar Teknis penerapan SPM di daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 7 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	RAPBD Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	879.124	805.971	91,68%	3.168.000.000.000
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	879.124	609.145	69,29%	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, 2020

C. REALISASI

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 8 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi capaian (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	RAPBD Tahun 2020	Jumlah orang yang terlayani	APBD Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	879.124	3.168.000.000.000	805.971	43.398.276.000	91,68%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	879.124		609.145	24.759.452.884	69,29%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, 2020

Analisis realisasi SPM bidang Pekerjaan Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – hari

Target penduduk terlayani pada bidang pelayanan Kebutuhan pokok Air minum pada tahun 2019 adalah 787.530 jiwa, sedangkan realisasi penduduk terlayani pada tahun 2019 adalah 748.960 jiwa. Pada tahun 2020 target penduduk terlayani adalah 790.984 jiwa dengan capaian target 771.684 jiwa. Dalam jangka waktu tahun 2019 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan angka realisasi penduduk terlayani sebesar 22.724 jiwa. Pada tahun 2021 penduduk yang akan terlayani yaitu sebesar 879.124. Sehingga capaian indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum pada penyediaan kebutuhan pokok Air Minum pada tahun 2020 yaitu sebesar 91,68%.

b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Target penduduk terlayani pada bidang pelayanan Kebutuhan pokok Air minum pada tahun 2019 adalah 787.530 jiwa, sedangkan realisasi penduduk terlayani pada tahun 2019 adalah 467.945 jiwa. Pada tahun 2020 target penduduk terlayani adalah 790.984 jiwa dengan capaian target 493.446 jiwa. Dalam jangka waktu tahun 2019 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan angka realisasi penduduk terlayani sebesar 25.501 jiwa. Pada tahun 2021 penduduk yang akan terlayani yaitu sebesar 879.124. Sehingga capaian indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum pada penyediaan kebutuhan pokok Air Minum pada tahun 2020 yaitu sebesar 69,29%.

Terjadi penurunan pada penduduk yang terlayani terjadi karena adanya lonjakan data kependudukan berdasarkan hasil sensus 2021 sebesar kurang lebih 10% mengakibatkan turunnya pencapaian pelayanan pada penduduk.

D. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2020 sebesar Rp3.168.000.000.000. Alokasi anggaran tersebut bersumber APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Wonosobo melalui beberapa program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum. Berdasarkan anggaran yang dialokasikan, direalisasikan sebesar Rp. 43.398.276.000 untuk alokasi air minum dan Rp. 24.759.452.884 untuk dana program sanitasi.

E. DUKUNGAN PERSONEL

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia. Dukungan tersebut antara lain sebagai personil Bidang Cipta Karya yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Dukungan personil dibagi menurut program penanganan sebagai berikut:

Program pelayanan pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik dibawah Kabid Cipta Karya yaitu Kasie Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, selanjutnya dibantu dengan Personil / Staff ASN (2 orang), Staff non ASN (10 orang), Pendamping Desa atau Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang

terbagi menjadi TFL Teknis dan TFL Pemberdayaan keseluruhan sebanyak (42 orang). Sedangkan Desa penerima program pelayanan tersebut yaitu terdiri dari 71 Des/Kelurahan, dari desa tersebut program tersebut menghasilkan jumlah SR Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebanyak (6002 Sambungan Rumah) dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebanyak (4511 Sambungan Rumah)

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

- Belum adanya data *online real time* yang mendeteksi jenis jenis layanan air minum dari berbagai penyedia yang diakses bersama menjadi satu data tunggal layanan.

b. Solusi

- Melakukan integrasi sistem pendataan secara *online* dan geodetik untuk menghasilkan data layanan dan data kebutuhan secara lebih tepat dan akurat.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat. Indikator tersebut merujuk pada jenis pelayanan dasar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, terdiri dari :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 9 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	RAPBD Tahun 2020
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah	135	11	100%	165.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	RAPBD Tahun 2020
	korban bencana di Kabupaten	layak huni				
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	28	28	100%	420.000.000

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, 2020

C. REALISASI

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 10 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi capaian (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	RAPBD Tahun 2020	Jumlah orang yang terlayani	APBD Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	11	165.000.000	8	165.000.000	72,72%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	28	420.000.000	38	570.000.000	136%

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, 2020

Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada jenis layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Wonosobo tahun 2020 baru tercapai 72,72% dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan alokasi anggaran yang digabung dengan kegiatan RTLH sehingga terjadi pergeseran prioritas sasaran. Sedangkan untuk jenis layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo, capaian sebesar 136% dari yang ditargetkan.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian penerapan Standar Pelayanan minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 sebesar Rp.735.000.000,00. Alokasi anggaran tersebut masuk dalam bagian dari anggaran untuk peningkatan rumah tidak layak huni yang sasarannya diperuntukkan sebagian bagi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Wonosobo.

E. Dukungan Personel

Guna mencapai target pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo tahun 2020, didukung oleh 8 personel. Personel tersebut terdiri atas 1 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Seksi dan 4 orang tenaga teknis.

F. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- masih kurangnya fasilitas Sarana dan Prasarana untuk mendukung operasional dan kelancaran program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
- masih adanya prasarana sarana utilitas umum (PSU) perumahan yang asetnya belum diserahkan ke Pemerintah Daerah.
- minimnya anggaran mengakibatkan program dan kegiatan tidak maksimal.
- kurangnya personel tenaga ahli/teknis pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

2) Solusi

- koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah lain untuk yang mendukung kelancaran program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
- koordinasi dengan pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Wonosobo.
- Identifikasi kebutuhan perencanaan untuk pengajuan anggaran agar program kegiatan bisa berjalan dengan baik.
- mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia, meningkatkan kapasitas SDM maupun menggunakan pihak konsultan.

4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar tersebut terdiri dari:

1. Warga yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati Wonosobo untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Warga yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
3. Warga yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berdasarkan jenis layanan dasar tersebut, pemenuhan layanan dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh dua Perangkat Daerah yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, untuk jenis layanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum; serta
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo, untuk jenis layanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 11 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	RAPBD Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	30	30	100%	175.000.000
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	21.566	21.566	100%	11.765.246.605
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	49.528	49.528	100%	
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.126	4.126	100%	
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	46	46	100%	100.000.000

C. REALISASI

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 12 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi capaian (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	RAPBD Tahun 2020	Jumlah orang yang terlayani	APBD Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	30	175.000.000	30	175.000.000	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	21.566	11.765.246.6 05	21.566	11.765.246.605	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	49.528		49.528		100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.126		4.126		100%

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi capaian (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	RAPBD Tahun 2020	Jumlah orang yang terlayani	APBD Tahun 2020	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	46	100.000.000	46		100%

Sumber: BPBD Kabupaten Wonosobo, 2020, 2. Kantor Satpol PP Kabupaten Wonosobo, 2020

D. Alokasi Anggaran

Guna mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp11.940.246.605,00 yang dibagi dalam beberapa Sub Urusan sebagai berikut:

1. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2020 sebesar Rp175.000.000,00 untuk program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan penegakan Peraturan Daerah secara persuasif.

2. Sub Urusan Bencana Daerah

Alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2020 sebesar Rp.11.765.246.605,00 untuk program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk penanganan bencana alam maupun non alam. Dalam penanganan bencana non alam, pada tahun 2020 juga untuk penanganan COVID-19 yaitu untuk penyiapan dan operasional Rumah Karantina Terpusat Kabupaten Wonosobo di lima lokasi.

3. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2020 untuk sub urusan kebakaran direncanakan dalam bentuk peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Akan tetapi, dengan adanya pandemi COVID-19 anggaran tersebut difokuskan untuk penanganan COVID-19. Dalam memenuhi kebutuhan operasional dan pelaksanaan pelayanan pemadam kebakaran, anggaran dipenuhi dari kegiatan pada Sub Urusan Bencana Daerah.

E. DUKUNGAN PERSONEL

Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan dengan dukungan personil sebagai berikut:

1. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dalam melaksanakan layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melibatkan dukungan 82 orang Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari 53 orang PNS dan 29 tenaga Non PNS.

2. Sub Urusan Bencana Daerah

Dalam melaksanakan layanan dasar Sub Urusan Bencana Daerah melibatkan dukungan 12 orang PNS dan 17 orang tenaga non PNS sebagai tenaga pendukung pelaksana, Tim Reaksi Cepat dan Pusat Pengendali Operasi.

3. Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan layanan dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota melibatkan dukungan 13 orang PNS dan 5 orang tenaga non PNS sebagai tenaga operasional pemadam kebakaran.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan

- Keterbatasan jumlah pegawai;
- Kualitas sumber daya manusia yang ada masih rendah;
- Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran masih kurang memadai;
- Keterbatasan anggaran guna peningkatan kualitas layanan dan operasional;
- Pemahaman terhadap penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal masih perlu ditingkatkan;
- Tipologi kelembagaan BPBD masih B, sementara beban kerja dan resiko tinggi dihadapkan pada cakupan, tipologi wilayah dan berbagai ancaman potensi bencana; dan
- Tata letak, kondisi dan lingkungan kantor BPBD yang belum memadai.

2) Solusi

- Mengusulkan penambahan PNS ke BKD dan penambahan personil Pusdalops, TRC, dan Damkar yang berkompetensi;
- Pegawai diikutsertakan pendidikan dan pelatihan;
- Usulan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah secara bertahap;
- Penguatan dalam pengusulan penganggaran;
- Peningkatan tipologi kelembagaan menjadi Tipe A;
- Memberdayakan relawan penanggulangan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo; dan
- Berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

4.6 URUSAN SOSIAL

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Umum adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara:

- a) Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b) Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Sedangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana, dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Tagana.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 13 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	RAPBD Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	7.496	2.829	100%	1.581.400.000
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1.129	369	100%	150.000.000
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh	7.999	864	100%	100.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	RAPBD Tahun 2020
		rehabilitasi sosial diluar panti				
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan engemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	335	71	100%	175.000.000
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	60	60	100%	150.000.000

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, 2020

C. REALISASI

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 14 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi capaian (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	RAPBD Tahun 2020	Jumlah orang yang terlayani	APBD Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2.829	1.581.400.000	2.829	1.657.380.000	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	369	150.000.000	369	145.100.000	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	864	100.000.000	864	100.000.000	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan engemis di luar	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	71	175.000.000	71	175.000.000	100%

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Realisasi capaian (%)
			Jumlah orang yang akan terlayani	RAPBD Tahun 2020	Jumlah orang yang terlayani	APBD Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
	panti						
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	17.480	150.000.000	17.480	12.382.515.000	100%

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, 2020

Analisis realisasi SPM bidang Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang termasuk sasaran program dalam indikator 1 adalah jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100%.

Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 telah melaksanakan pelayanan dasar di luar panti terhadap penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar sebanyak 2.829 orang, pelayanan terhadap anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar sebanyak 369 anak, lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar sebanyak 864 orang serta gelandangan dan pengemis sebanyak 71 orang. Sedangkan target disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun adalah sebanyak 2.829 orang, anak terlantar 369 anak, lanjut usia terlantar 864 orang dan pengemis gelandangan sebanyak 71 orang. Sehingga capaian indikator SPM Bidang Sosial pada tahun 2020 tercapai 100%.

Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

Sasaran indikator pada program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial adalah jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen).

- b. Pada tahun 2020 terdapat korban bencana terlapor sebanyak 17.480 orang, yang terdiri dari korban bencana alam dan bencana non alam yaitu dengan adanya pandemi COVID-19, dan semua korban bencana tersebut sudah terlayani untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya, sehingga capaian indikator SPM pada program tersebut tahun 2020 tercapai 100%.

D. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial pada tahun 2020 sebesar Rp18.194.375.000. Alokasi anggaran tersebut bersumber APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Wonosobo melalui beberapa program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial. Berdasarkan anggaran yang dialokasikan, direalisasikan sebesar Rp17.760.905.584 atau 97,61.

E. DUKUNGAN PERSONEL

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia. Dukungan tersebut antara lain sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dukungan personel dibagi menurut program penanganan sebagai berikut:

a. Program Rehabilitasi Sosial

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini didukung oleh 3 orang PNS dan 4 orang non PNS, dibantu oleh TSKS sebanyak 15 orang, 2 orang pendamping dari kemensos (pendamping disabilitas dan sakti peksos/pendamping anak).

b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Dalam melaksanakan program dan kegiatan ini didukung oleh 2 orang tenaga PNS dan dibantu oleh Tagana (taruna siaga bencana) 15 orang dan 30 tagana muda.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1) Permasalahan

- Belum adanya rumah singgah di Kabupaten Wonosobo, yangmana rumah singgah tersebut merupakan salah satu sarana pelayanan di luar panti yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, sehingga dengan belum adanya rumah singgah tersebut pelayanan bagi PPKS terlantar masih belum optimal.
- Sebagian kegiatan belum ada data sasaran berdasarkan pendataan karena data sasaran sifatnya serta merta berdasarkan permohonan dan laporan, contohnya kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan di shelter dan kegiatan Operasional Logistik Bencana dan Pelayanan Psikososial bagi Korban Bencana Alam.
- Belum adanya data base PPKS yang valid dan up to date untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan yang tepat sasaran.
- Minimnya anggaran untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari APBD, khususnya APBD Kabupaten.
- Masih rendahnya kompetensi sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PPKS.
- Masih minimnya jumlah PSKS dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PPKS.
- Masih minimnya sarana prasarana untuk pelayanan PPKS, antara lain untuk kendaraan operasional pelayanan rehabilitasi sosial dan kendaraan untuk distribusi logistik bencana.

2) Solusi

- Mengusulkan anggaran untuk pembangunan rumah singgah baik melalui anggaran APBD Kabupaten maupun melalui bantuan keuangan provinsi.
- Menggunakan data estimasi yang dilakukan perhitungan oleh pemegang program berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia.

- Melakukan pendataan dan pemutakhiran (*up-dating*) melalui verifikasi dan validasi data PMKS minimal setahun sekali.
- Mengusulkan/memaksimalkan anggaran untuk ditambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan PMKS baik melalui anggaran APBD, APBN, dan dengan menggabungkan melalui dana desa untuk tiap-tiap desa dalam membantu penanganan PMKS atau dengan kerjasama pihak ketiga dengan LSM, CSR ataupun lembaga lainnya.
- Mengusulkan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan PMKS.
- Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai kompetensi dalam penanganan kesejahteraan sosial, misalnya pekerja sosial dan penyuluh sosial.
- Mengajukan permohonan penambahan kendaraan layanan operasional untuk rehabilitasi sosial dan layanan kebencanaan.